

Fenomena Dinasti Politik dari Perspektif Aksiologis

Gilang Nugraha Pratama¹, Azmi Fitriisia², Ofianto³

^{1,2,3} Departemen Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email: Pratamadakan@gmail.com¹, azmifitrisia@fis.unp.ac.id²,
ofianto.anto@fis.unp.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai tentang fenomena dinasti politik dari perspektif aksiologis. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, situs web, makalah skripsi, dan dokumen lainnya dalam format cetak maupun daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena dinasti politik telah terjadi sejak lama dan terus berlangsung hingga saat ini. Dampaknya mencakup penipisan peluang bagi individu lain dalam memimpin, merusak ekonomi masyarakat, ketidakmerataan pembangunan, serta munculnya korupsi dan nepotisme. Dinasti politik tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga terjadi di tingkat lokal. Dari perspektif aksiologis, prinsip moral dan etika menjadi kunci dalam kepemimpinan politik. Aksiologi politik menekankan bahwa pemimpin politik harus mempertahankan integritas moral dan etika. Perspektif ini juga menekankan pentingnya mengutamakan hak asasi manusia dalam konteks politik. Dalam hal ini, dianggap bahwa keputusan politik yang melanggar hak asasi manusia tidak sejalan dengan prinsip moral yang mendasari tindakan politik. Oleh karena itu, penting untuk menilai dan mengkaji tindakan politik dari sudut pandang aksiologis guna memastikan keberlanjutan nilai-nilai moral dan etika dalam konteks kepemimpinan politik.

Kata Kunci : *Dinasti, Politik, Aksiologis*

Abstract

This research discusses the phenomenon of political dynasties from an axiological perspective. The method used is descriptive qualitative research with a literature study approach. Data is obtained through various literature sources, such as books, journals, websites, thesis papers, and other documents in print and online formats. The results showed that the phenomenon of political dynasties has occurred for a long time and continues to this day. The impacts include the depletion of opportunities for other individuals to lead, damage to the community's economy, uneven development, and the emergence of corruption and nepotism. Political dynasties are not only limited to the national level, but also occur at the local level. From an axiological perspective, moral and ethical principles are key in political leadership. Political axiology emphasizes that political leaders must maintain moral and ethical integrity. This perspective also emphasizes the importance of prioritizing human rights in the political context. In this regard, it is considered that political decisions that violate human rights are not in line with the moral principles underlying political action. Therefore, it is important to assess and study political action from an axiological perspective to ensure the sustainability of moral and ethical values in the context of political leadership.

Keywords: *Dynasty, Politics, Axiological*

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah sebuah ideologi atau gagasan yang menekankan bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama (Harefa & Fatolosa Hulu, 2020). Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Indonesia, disebutkan dengan tegas bahwa "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Oleh karena itu, Indonesia dianggap sebagai negara dengan demokrasi (Rujito, 2012). Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu implementasi nyata dari sistem demokrasi di Indonesia. Pemilu adalah praktik demokrasi yang bertujuan untuk memberikan kedaulatan rakyat dan memilih perwakilan untuk lembaga legislatif dan eksekutif (Efyanti, 2019). Kegiatan pemilihan umum dapat dianggap sebagai pesta demokrasi, dengan tujuan utamanya untuk memilih pemimpin yang akan menduduki posisi di lembaga legislatif dan eksekutif.

Proses pesta demokrasi ini sangat memengaruhi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Diharapkan pemilihan pemimpin yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan mayoritas akan membawa perubahan positif dalam pembangunan dan pengelolaan Negara (Ndouk, 1984), (Pramudia, 2022). Oleh karena itu, pemilihan menjadi sarana penting untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, dan partisipasi aktif warga negara dalam menentukan kepemimpinan adalah kunci utama untuk mencapai tujuan demokrasi. Politik telah menjadi komponen penting dari kehidupan masyarakat selama sejarah panjang manusia. Jalan dan kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh keputusan politik (Huda, 2017). Akibatnya, studi politik telah menarik perhatian para ilmuwan dan peneliti selama berabad-abad.

Fenomena dinasti politik menjadi semakin menarik bagi studi politik modern di tengah perubahan politik global (Ukhra, 2022). Dinasti politik keluarga menunjukkan bagaimana kekuasaan dan pengaruh politik berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fenomena ini menunjukkan ketidakseimbangan struktural dalam pembagian kekuasaan politik (Yani, 2018). Hal ini dapat berdampak pada proses demokrasi dan keadilan politik. Di beberapa negara di seluruh dunia, dinasti politik, yang mengacu pada pergeseran kekuasaan politik dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga berikutnya dalam struktur kekuasaan yang kokoh, memiliki dampak yang signifikan pada tata kelola politik, representasi, dan distribusi kekuasaan (Maliki, 2018). Tetapi bagaimana dinasti politik membahayakan atau menguntungkan masyarakat adalah masalah yang kompleks. Paradigma aksiologis yang berpusat pada nilai-nilai, etika, dan moralitas menjadi suatu paradigma yang relevan untuk menganalisis fenomena dinasti politik. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana dinasti politik dipahami dan dievaluasi dari sudut pandang nilai-nilai etis dalam masyarakat. Aksiologi memberikan perspektif yang mendalam untuk mengeksplorasi apakah fenomena dinasti politik dapat diterima dari sudut pandang moral.

Oleh karena itu, fenomena yang terkait dengan dinasti politik harus dipelajari secara menyeluruh agar dapat memahami dampak mereka terhadap stabilitas politik dan kemajuan suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mengevaluasi nilai-nilai etis yang mendasari fenomena dinasti politik, serta menggali potensi pengaruh mereka terhadap sistem politik dan sosial masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ilmiah ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menguraikan aspek-aspek penting yang terlibat dalam fenomena dinasti politik, serta menggali potensi pengaruh mereka terhadap integritas politik, partisipasi, dan sistem sosial masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian ini terfokus pada studi kepustakaan (Azizah, 2017). Studi kepustakaan adalah upaya untuk mengumpulkan data atau karya ilmiah tentang topik penelitian. Dalam penulisan ini, sumber atau data yang digunakan termasuk disertasi, tesis, buku, ensiklopedia, peraturan, ketetapan, buku tahunan, dan sumber lainnya yang dapat memberikan informasi. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk melihat fenomena dinasti politik dari sudut pandang nilai-nilai moral masyarakat. Metode ini memungkinkan penelitian untuk memahami konteks

secara menyeluruh, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks, dan menemukan pola atau tren yang berasal dari berbagai sumber literatur yang telah diakses (Nugrahani & Hum, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk merangkum, menganalisis, dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana dinasti politik dinilai dari sudut pandang nilai-nilai etis. Dengan menggunakan berbagai sumber literatur, termasuk karya akademis dan referensi hukum, diharapkan penelitian ini akan memberikan landasan yang kokoh untuk menilai fenomena etis dinasti politik dalam konteks politik modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinasti Politik

Dinasti politik menunjukkan bagaimana kekuasaan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu keluarga, yang menghasilkan garis keturunan pengaruh politik yang panjang. Anggota keluarga menggantikan satu sama lain dalam peran politik atau kepemimpinan dalam kerangka dinasti politik, menandakan dominasi politik yang tetap ada oleh suatu keluarga (Lagunoff, 2006). Susanti (2017) melakukan penelitian berjudul "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia" yang menunjukkan bahwa fenomena dinasti politik dapat ditemukan dalam berbagai jenis pemerintahan, seperti monarki dan republik. Dalam banyak monarki, seperti yang terlihat di kerajaan seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Arab Saudi, keturunan langsung sering mengambil alih kekuasaan, menunjukkan suksesi dinasti yang terintegrasi dalam struktur politik (Susanti, 2017).

Dengan fokus pada studinya tentang Denmark pada paruh pertama abad ke-19, Frandsen (2008) mengeksplorasi dinasti politik dalam konteks monarki. Fokus analisisnya adalah cara dinasti politik dapat membentuk dan mempengaruhi dinamika politik monarki (Frandsen, 2008). Suryana et al. (2022) membandingkan sistem pemerintahan demokrasi dan monarki dalam tulisan mereka "Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki." Ini memberikan pandangan yang lebih luas (Suryana et al., 2022).

Meskipun masa jabatan presiden republik terbatas, dinasti politik masih dapat muncul melalui peran politik keluarga dalam mempertahankan kekuasaan. Studi ini menggambarkan dinasti politik sebagai fenomena yang mencakup berbagai konteks politik, baik di negara monarki maupun republik. Dinasti politik terjadi dalam sistem politik di mana kelompok keluarga memegang kekuasaan politik, jabatan, atau pengaruh dari generasi ke generasi. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian dalam pembagian kekuasaan di mana anggota keluarga atau individu yang termasuk dalam keluarga secara konsisten memegang posisi atau jabatan penting dalam lembaga politik atau pemerintahan (Fitri, 2019). Fenomena dinasti politik dapat ditemukan dalam berbagai jenis sistem politik, seperti monarki dan republik. Ini menunjukkan adanya struktur kekuasaan yang terpusat dalam suatu keluarga atau individu tertentu, yang dapat menyebabkan warga negara tidak setara dalam akses ke kekuasaan politik. Dalam situasi seperti ini, dinasti politik dapat memiliki dampak negatif yang berbeda, seperti kekurangan variasi dalam kepemimpinan, kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakseimbangan representasi di sistem politik. Selain itu, kondisi ini dapat menimbulkan hambatan bagi pembangunan demokrasi representatif yang efektif (Effendi, 2018).

Masyarakat sering mengkritik dinasti politik karena dominasi jangka panjang suatu keluarga atau individu dalam kepemimpinan politik. Kritik ini berasal dari kemungkinan munculnya keadaan di mana posisi publik dianggap sebagai hak waris daripada hasil dari proses pemilihan dan dukungan publik yang adil. Menurut perspektif ini, dinasti politik menantang prinsip demokrasi dan partisipasi politik yang adil. Munculnya gagasan bahwa posisi publik akan diwariskan secara turun-temurun daripada didasarkan pada meritokrasi atau dukungan masyarakat yang adil adalah salah satu kritik utama terhadap dinasti politik (Suharto et al., 2017). Keluarga atau individu tertentu mendominasi panggung politik tanpa memperhatikan kualifikasi atau kemampuan kepemimpinan, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan kerugian saat memberikan jabatan penting.

Dinasti politik mengancam pentingnya proses demokratisasi dan partisipasi politik yang merata dalam masyarakat. Suatu keluarga atau kelompok tertentu mungkin memiliki

dominasi yang menghambat orang lain untuk terlibat dalam proses politik atau memimpin pemerintahan (Anggara, 2013). Oleh karena itu, dinasti politik tidak hanya menyebabkan ketidaksamaan dalam kesempatan politik, tetapi juga dapat merusak prinsip keadilan dan kesetaraan dalam sistem politik. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat dan pembuat kebijakan harus bekerja sama untuk memperkuat sistem pemilihan publik yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Untuk mempertahankan sistem politik dan prinsip demokratis, sangat penting untuk mengurangi pengaruh dinasti politik dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki peluang yang sama dalam proses politik.

Dinasti Politik Di Indonesia

Dalam konteks politik, praktik pemberian posisi pada keluarga dalam struktur kekuasaan, yang sering dikenal sebagai dinasti politik, telah menjadi perhatian masyarakat Indonesia baik di tingkat lokal maupun nasional (Dwiyanto, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem yang lebih demokratis belum sepenuhnya berkembang, menunjukkan bahwa akar feodalisme dan tradisi monarki masih membayangi kemajuan politik di Indonesia. Kajian dinasti politik sangat penting karena membutuhkan pemahaman yang kuat tentang bagaimana kekuasaan berkembang, hubungan keluarga yang berkuasa, dan dampak dinasti politik pada struktur politik secara keseluruhan. Banyak kali, dinasti politik dapat dianggap sebagai bagian dari rantai konflik yang berlangsung dari generasi ke generasi. Praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang representasi, keadilan, dan meritokrasi, yang sering menjadi fokus analisis politik (Hidayat et al., 2019).

Dalam dinasti politik, posisi politik atau administratif dapat diwariskan dari satu anggota keluarga ke anggota keluarga berikutnya tanpa mempertimbangkan kemampuan atau bakat mereka. Hal ini dapat mengancam dasar demokrasi, yang seharusnya berbasis pada meritokrasi, di mana orang diberi posisi berdasarkan kemampuan dan prestasi mereka (Chalik, 2017). Ketidaksepakatan tentang dinasti politik juga menyebabkan masalah feodalisme, di mana kekuasaan didasarkan pada keturunan daripada prinsip demokratis. Fenomena ini mendorong konsolidasi elit politik, yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam sumber daya dan pengambilan keputusan. Untuk merancang reformasi politik yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas (Harahap et al., 2023). Transparansi, dan partisipasi masyarakat, sangat penting untuk memahami dinasti politik Indonesia. Mereka melakukan reformasi kebijakan untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan dan komitmen mereka terhadap kepentingan publik daripada ikatan keluarga (Harahap et al., 2023).

Sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia, praktik dinasti politik telah berlangsung. Keluarga yang memegang jabatan politik atau pemerintahan dikenal sebagai dinasti politik. Fenomena ini telah ada sejak Orde Lama, terutama berkaitan dengan keluarga Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Keturunan Megawati Soekarnoputri, Sekmawati, Guruh Soekarno, dan Puan Maharani, yang merupakan anggota keluarga Soekarno, mengikuti tradisi politik keluarga (Irawan, n.d.). Keluarga KH. Abdurrahman Wahid, termasuk saudara-saudara dan anak-anaknya, terlihat seperti dinasti politik selain keluarga Soekarno. Keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga memiliki anggota politik seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Eddie Baskoro, Hartanto Edhie Wibowo, Agus Hermanto, Sartono Hutomo, Dwi Astuti Wulandari, dan Agung Budi Santosa. Fenomena dinasti politik masih terlihat jelas selama pemerintahan Joko Widodo. Anak-anak dan keluarga Joko Widodo juga aktif terlibat dalam politik Indonesia. Sebagai contoh, Gibran Rakabuming Raka adalah cawapres, Kaesang Pangarep adalah ketua PSI, dan Bobby Nasution, menantu Joko Widodo, adalah walikota Medan (Safitri, 2023).

Analisis dinasti politik di Indonesia menunjukkan bahwa ini bukanlah hal baru dan masih ada. Meskipun ada beberapa masalah terkait nepotisme, kritik terhadap praktik dinasti politik, dan konsekuensi negatifnya terhadap demokrasi, namun fenomena ini masih mendominasi pembicaraan politik di berbagai wilayah Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Ramlan Darmansyah, terutama yang berkaitan dengan dinasti politik di wilayah Riau, memberikan gambaran langsung tentang bagaimana fenomena ini menyebar ke tingkat

daerah. Pertanyaan tentang demokrasi, partisipasi publik, dan transparansi pengambilan keputusan politik muncul sebagai akibat dari fenomena dinasti politik di Indonesia (Fitri, 2019).

Untuk menghilangkan dinasti politik, menjamin keadilan, dan mendorong perwakilan politik yang lebih merata, diperlukan reformasi yang signifikan. Keluarga elit menggunakan pola ini untuk menjalankan politik dinasti, menempatkan kerabat mereka di posisi strategis dalam pemerintahan (Muliawaty, 2023). Di Indonesia, dinasti politik terbentuk secara "dirancang" dan "secara kebetulan". Dinasti politik "dirancang" telah terbentuk sejak lama, dengan hubungan kuat, jaringan, dan familisme dalam pemerintahan. Ini berarti keluarga yang terlibat dalam kontestasi politik atau pemerintahan diatur untuk mencapai tujuan mereka.

Dalam situasi suksesi pemerintahan, keluarga dekat tiba-tiba mencalonkan diri untuk menggantikan pemimpin pemerintahan sebelumnya dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan informal terhadap penggantinya jika mereka menang dalam kontestasi politik. Ini adalah alasan di balik dinasti politik yang terjadi secara tidak sengaja. Politik dinasti cenderung berfokus pada hubungan pribadi daripada kemampuan individu. Dinasti politik saat ini memiliki konsekuensi yang signifikan, di mana potensi kerusakan terhadap demokrasi yang seharusnya telah dibangun dapat terjadi (Fitri, 2019). Dinasti politik dapat menghalangi kemunculan pemimpin yang baik dan memungkinkan tirani baru. Selain itu, dinasti politik juga dapat berdampak pada sektor ekonomi karena dapat menghancurkan persaingan usaha yang baik. Sistem ekonomi secara keseluruhan dapat terjejas oleh keterlibatan orang-orang terdekat dalam setiap pemerintahan (Nizar & Alqarni, 2021). Saat ini, dinasti politik cenderung bergantung pada hubungan pribadi daripada kompetensi. Achmad Rilyadi dari Politisi PKS menganggap dinasti politik sebagai kenyataan demokrasi. Jika memenuhi dua persyaratan utama, dinasti politik dapat terjadi. Pertama, mereka dipilih oleh rakyat, dan kedua, pemilihan dilakukan secara jujur dan adil. Kematangan jaringan dan merek dinasti yang sudah dikenal publik menyebabkan dinasti politik terjadi.

Pandangan Politik Dari Perspektif Aksiologis

Aksiologi adalah subdisiplin filsafat yang secara khusus memfokuskan diri pada penelitian mendalam tentang nilai dan penilaian dalam konteks masyarakat dan budaya. Konsep aksiologis melibatkan analisis filosofis tentang apa itu nilai, bagaimana mereka muncul, dan bagaimana mereka memengaruhi masyarakat dan individu (Rosa, 2023). Pemahaman kita tentang konsep nilai adalah salah satu komponen penting dalam kerangka konsep aksiologis. Nilai dapat didefinisikan sebagai prinsip atau standar yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan apa yang benar atau salah, baik atau buruk. Nilai-nilai ini dapat mencakup aspek seperti moralitas, etika, keindahan, atau konsep lain yang memberikan arah atau tujuan bagi kehidupan manusia (DARYONO et al., 2021), (Harman, 2003).

Dalam konsep aksiologis, norma-norma juga merujuk pada aturan atau standar perilaku yang dianggap sebagai penerimaan atau harapan dalam suatu masyarakat. Ini termasuk norma sosial, budaya, atau moral yang membentuk persepsi tentang perilaku yang dianggap sesuai atau tidak sesuai. Dalam cabang aksiologi yang berbeda, etika adalah studi tentang prinsip-prinsip dan tindakan moral. Tujuan etika adalah untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang dianggap baik atau buruk serta memberikan kerangka kerja untuk membuat keputusan moral (Ronda, 2018). Sebagai komponen penting dari teori aksiologis, estetika membahas konsep keindahan dan seni. Ini mencakup pemahaman tentang apa yang dianggap indah dan bagaimana nilai-nilai ini tercermin dalam karya seni, musik, sastra, dan jenis seni lainnya. Salah satu bagian penting dari aksiologi, filsafat nilai bertujuan untuk menjelaskan dasar-dasar nilai dan standar yang digunakan untuk mengevaluasi pengalaman manusia. Ini mencakup penyelidikan filsafat tentang asal-usul, sifat, dan makna nilai. Akibatnya, aksiologi adalah bidang filsafat yang sangat penting dalam membantu membimbing pemahaman manusia tentang nilai-nilai yang membentuk masyarakat dan budaya kita. Selain itu, aksiologi juga memberikan landasan filosofis untuk berbagai konteks

kehidupan yang memungkinkan kita mempertimbangkan dan membuat keputusan (Luthfi, 2018).

Pandangan politik dari sudut pandang aksiologis membawa kita ke bidang filsafat politik yang berfokus pada prinsip moral dan etika sebagai dasar tindakan politik (Hartanto, 2015). Dalam konteks ini, beberapa elemen penting dalam politik harus dipertimbangkan dari sudut pandang aksiologis. Menurut aksiologis, politik harus mempertimbangkan prinsip moral. Diharapkan pertimbangan etika mendalam, termasuk ide-ide seperti keadilan, kebebasan, dan kesetaraan, akan digunakan untuk membuat keputusan dan kebijakan publik. Selain itu, aksiologi politik menekankan bahwa para pemimpin politik harus memiliki integritas moral dan etika. Pemimpin diharapkan bertindak jujur dan sesuai dengan prinsip moral yang diterima masyarakat. Perspektif aksiologis terhadap politik mengutamakan hak asasi manusia. Dianggap bahwa prinsip moral yang mendasari tindakan politik tidak selaras dengan keputusan politik yang melanggar hak asasi manusia (Abadi, 2016).

Keadilan sosial dalam distribusi sumber daya sangat penting, menurut aksiologi politik. Aksiologi politik mendorong pengambilan keputusan yang mempertimbangkan baik aspek moral maupun kepentingan politik (Zamroni, 2022). Melihat politik dari perspektif aksiologis membantu kita memahami bagaimana nilai-nilai moral dan etika membentuk kerangka kerja tindakan politik dan kebijakan. Pendekatan ini memberikan fondasi yang kokoh untuk pengambilan keputusan politik yang berkelanjutan dan beretika (Susanto, 2021).

SIMPULAN

Dinasti politik merupakan fenomena di mana kekuasaan politik, jabatan, atau pengaruh dalam sistem politik secara berulang-ulang dipegang oleh keluarga tertentu dari generasi ke generasi. Dinasti adalah praktik turun-temurun dalam pemerintahan, yang dapat muncul dalam berbagai bentuk sistem politik, baik monarki maupun republik. Di Indonesia, politik dinasti sudah hadir sejak masa Orde Lama, contohnya kepemimpinan Soekarno, KH. Abdurrahman Wahid, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo, di mana seluruh keluarga tersebut terlibat dalam urusan politik di Indonesia. Politik dinasti tidak pernah menghilang dan terus berlangsung sepanjang sejarah. Praktik ini sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Politik dinasti lebih banyak didasarkan pada kedekatan personal daripada kemampuan yang dimiliki oleh individu, sehingga berdampak negatif terhadap demokrasi yang ingin dibangun. Praktik politik dinasti dapat menghambat kemunculan pemimpin berkualitas dan berpotensi menciptakan bentuk tirani baru. Selain itu, dampak politik dinasti juga dirasakan dalam ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks persaingan. Politik dinasti cenderung tidak mempertimbangkan kualifikasi dan keahlian, melainkan lebih fokus pada hubungan personal, sehingga dapat merugikan masyarakat dalam persaingan ekonomi.

Dari perspektif aksiologis, yang merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai dan penilaian, politik tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan nilai-nilai moral. Aksiologi politik menyoroti pentingnya integritas moral dan etika dalam kepemimpinan politik. Dalam konteks ini, aksiologi politik menekankan perlunya mencapai keadilan sosial dalam distribusi sumber daya. Oleh karena itu, aksiologi politik mendorong pengambilan keputusan yang tidak hanya memperhitungkan kepentingan politik, tetapi juga aspek-aspek moral yang mendasarinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, T. W. (2016). Aksiologi: antara etika, moral, dan estetika. *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 187–204.
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia* (Vol. 1, Issue 1). CV Pustaka Setia.
- Azizah, A. (2017). *Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif*. State University of Surabaya.
- Chalik, A. (2017). *Pertarungan elite dalam politik lokal*. PUSTAKA PELAJAR YOGYAKARTA.
- DARYONO, D., Firmansyah, M. B., Mariyanti, M., Budiman, M. F., Muhajir, A., Muthoharoh, D., Sari, A. M., Nufus, N. K., Ismalia, E. R., & Rohmah, S. (2021). *Kontribusi Landasan Pendidikan Dalam Aspek Humas Pendidikan*. Lembaga Academic &

Research Institute.

- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Ugm Press.
- Effendi, W. R. (2018). Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 233–247.
- Efyanti, Y. (2019). Pemilihan Umum (Pemilu) Langsung di Indonesia Perspektif Sosiologis dan Hukum Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2).
- Fitri, A. (2019). Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 91–111.
- Frandsen, S. B. (2008). *Holsten i helstaten: hertugdømmet inden for og uden for det danske monarki i første halvdel af 1800-tallet*. Museum Tusulanum.
- Harahap, M., Nadya, R., Sitanggang, W., & Jamaludin, J. (2023). Elit Politik di Indonesia: Akar dan Dampak Penyalahgunaan Hak Berdemokrasi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(06), 2149–2160.
- Harefa, D., & Fatosola Hulu, M. M. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Pm Publisher.
- Harman, G. (2003). Three trends in moral and political philosophy. *J. Value Inquiry*, 37, 415.
- Hartanto, W. (2015). Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(3), 469–483.
- Hidayat, E., Prasetyo, B., & Yuwana, S. (2019). Runtuhnya politik oligarki dalam pemilihan kepala desa: Kekalahan incumbent pada pilkades Tanjung Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik*, 4(1), 9.
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.
- Irawan, S. (n.d.). *Elite Dan Partai Politik (Kekuasaan Megawati Soekarnoputri Di Kursi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDI PERJUANGAN] Dalam Lima Periode)*. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
- Lagunoff, R. (2006). Credible communication in dynastic government. *Journal of Public Economics*, 90(1–2), 59–86.
- Luthfi, K. (2018). *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas*. Guepedia.
- Maliki, Z. (2018). *Sosiologi politik: makna kekuasaan dan transformasi politik*. Ugm Press.
- Muliawaty, L. (2023). *PENGANTAR ETIKA BIROKRASI*. Lemlit Unpas Press.
- Ndouk, O. O. (1984). Pertumbuhan Demokrasi di Indonesia. *Analisis CSIS*, 8, 563–593.
- Nizar, M., & Alqarni, W. (2021). *Book Series Demokrasi dan Otonomi Daerah Volume 1: Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal (Vol. 1)*. Syiah Kuala University Press.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3–4.
- Pramudia, P. S. (2022). *Global: Jurnal Politik Internasional*.
- Ronda, A. M. (2018). *Tafsir Kontemporer Ilmu Komunikasi: Tinjauan Teoretis, Epistemologi, Aksiologi*. Indigo Media.
- Rosa, A. (2023). Integrasi Filsafat dan Ilmu Sosial Holistik dalam Menafsirkan Al-Qur'an. *Aqlania*, 14(1), 43–72.
- Rujito, A. (2012). *PENGATURAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 (Studi Atas Kekuasaan Presiden)*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Safitri, E. (2023). *Jokowi Jawab soal Anggapan Dinasti Politik: Serahkan Masyarakat Saja*. Detik News. <https://news.detik.com/pemilu/d-6980056/jokowi-jawab-soal-anggapan-dinasti-politik-serahkan-masyarakat-saja>
- Suharto, D. G., Nurhaeni, I. D. A., Hapsari, M. I., & Wicaksana, L. (2017). Pilkada, politik dinasti, dan korupsi. *Pertemuan Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial PTN Se-Indonesia*, 30–49.
- Suryana, C., Fatihah, N. A., Subki, M. T., & Maulani, M. I. (2022). *Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Susanti, M. H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and*

- Civil Society*, 1(2), 111–119.
- Susanto, A. (2021). *Filsafat ilmu: Suatu kajian dalam dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis*. Bumi Aksara.
- Ukhra, A. (2022). *Isu Politik Identitas dan Dinasti Politik dalam Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119.
- Zamroni, M. (2022). *Filsafat Komunikasi: Pengantar Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*. IRCiSoD.